
Implementasi Nilai Persatuan Dalam Penetapan Prioritas Penerima Bansos bagi Kelompok Rentan di Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang

Usman Jalal Siregar¹ Parlaungan Gabriel Siahaan² Rista Novita Sari Perangin-Angin³ Dwi Afnelia Rivana Okta Br Sitepu⁴ Mardianti Manday⁵ Desy Cristin Damanik⁶ Eva Nurul Huda⁷

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4,5,6,7}

Email: jsusman061@gmail.com¹ parlaungansiahaan@unimed.ac.id²

ristanovitasari227@gmail.com³ dwisitepu145@gmail.com⁴ mardiyantimanday@gmail.com⁵ cristindamanik14@gmail.com⁶ enurul532@gmail.com⁷

Abstrak

Penelitian ini membahas implementasi nilai Persatuan Indonesia dalam penetapan prioritas penerima bantuan sosial (bansos) bagi kelompok rentan di Kelurahan Kenangan Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Bantuan sosial merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti masyarakat miskin, lansia, dan penyandang disabilitas. Namun, dalam pelaksanaannya sering ditemukan permasalahan seperti ketidaktepatan sasaran, kurangnya transparansi, serta dugaan diskriminasi yang dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan konflik antar warga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian diharapkan dapat menggambarkan bagaimana pemerintah daerah menjaga prinsip non-diskriminatif dalam menentukan penerima bansos, menilai dampak distribusi bansos terhadap potensi konflik sosial, serta menganalisis peran nilai sila ke-3 Pancasila dalam menciptakan harmoni sosial. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah agar kebijakan bansos dapat dilaksanakan secara lebih adil, transparan, tepat sasaran, serta mampu memperkuat persatuan dan solidaritas masyarakat.

Kata Kunci: Persatuan Indonesia, Bantuan Sosial, Non-Diskriminatif, Konflik Sosial, Kelompok Rentan.

Abstract

This study discusses the implementation of the value of Indonesian Unity in determining the priority of social assistance (bansos) recipients for vulnerable groups in Kenangan Baru Village, Percut Sei Tuan District, Deli Serdang Regency. Social assistance is one of the government's policies aimed at improving community welfare, especially for vulnerable groups such as the poor, the elderly, and people with disabilities. However, in its implementation, several problems often arise, including inaccurate targeting, lack of transparency, and alleged discrimination, which may lead to social jealousy and conflicts among residents. This research uses a qualitative method with a descriptive approach, employing data collection techniques such as observation, interviews, and documentation. The results of this study are expected to describe how the local government maintains non-discriminatory principles in determining social assistance recipients, assess whether the distribution of social assistance helps prevent social conflict, and analyze the role of the third principle of Pancasila (Indonesian Unity) in creating social harmony. This research is also expected to provide recommendations for the government to improve the fairness, transparency, and accuracy of social assistance distribution, as well as to strengthen unity and social solidarity within the community.

Keywords: Indonesian Unity, Social Assistance, Non-Discriminatory Principle, Social Conflict, Vulnerable Groups



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Bantuan sosial (bansos) merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti masyarakat miskin, lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi. Secara umum, bansos menjadi instrumen negara untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya sering muncul hambatan seperti kurangnya transparansi, lemahnya komunikasi publik, serta ketidaktepatan data penerima bantuan, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Gusrienti, 2025a). Permasalahan dalam distribusi bansos tidak hanya terjadi pada aspek teknis administrasi, tetapi juga menyangkut aspek sosial yang lebih luas. Dalam beberapa kasus, masyarakat menilai bahwa proses penentuan penerima bansos belum sepenuhnya objektif dan transparan, sehingga menimbulkan dugaan adanya diskriminasi atau ketidakadilan. Ketika bansos tidak tersalurkan sesuai kebutuhan masyarakat yang berhak, maka akan muncul kecemburuan sosial yang berpotensi memicu konflik antar warga. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakadilan dalam distribusi bansos dapat menjadi faktor yang melemahkan hubungan sosial dalam masyarakat (Gemiharto & Juningsih, 2021). Selain itu, kurangnya keterbukaan informasi dalam penyaluran bansos juga dapat memperburuk kondisi sosial masyarakat.

Minimnya informasi yang jelas terkait mekanisme, syarat penerima, dan proses verifikasi menyebabkan masyarakat lebih mudah percaya pada isu yang beredar di lingkungan sekitar maupun media sosial. Kondisi tersebut dapat memunculkan keresahan, ketegangan sosial, hingga konflik horizontal di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, transparansi dan akuntabilitas menjadi unsur penting dalam penyaluran bantuan sosial agar dapat meningkatkan kepercayaan publik dan mencegah konflik sosial. Kelurahan Kenangan Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu wilayah yang memiliki kelompok masyarakat rentan yang sangat membutuhkan bantuan sosial sebagai bentuk perlindungan ekonomi. Dalam realitas sosial, penyaluran bansos di lingkungan masyarakat sering menimbulkan pro dan kontra akibat perbedaan persepsi mengenai siapa yang berhak menerima bantuan. Jika pemerintah daerah tidak mampu menjaga prinsip non-diskriminatif dalam penentuan penerima, maka akan muncul ketidakpuasan warga dan memperbesar potensi konflik sosial di tengah masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk mengelola distribusi bansos dengan pendekatan yang adil, terbuka, dan berorientasi pada kepentingan bersama.

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan kebijakan publik. Sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, menekankan pentingnya membangun solidaritas sosial, menjaga kebersamaan, serta menghindari perpecahan akibat perbedaan kepentingan. Implementasi nilai sila ketiga dalam penyaluran bansos sangat penting karena dapat menjadi dasar dalam menciptakan harmoni sosial. Jika kebijakan bansos dijalankan secara adil dan transparan, maka bantuan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan ekonomi, tetapi juga dapat memperkuat rasa persatuan masyarakat serta mencegah konflik sosial (Gemiharto & Juningsih, 2021). Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji bagaimana pemerintah daerah menjaga prinsip non-diskriminatif dalam menentukan penerima bansos, menilai apakah distribusi bansos membantu mencegah konflik sosial antar warga, serta menganalisis peran nilai sila ketiga Pancasila dalam menciptakan harmoni sosial di Kelurahan Kenangan Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran nyata tentang implementasi nilai persatuan dalam kebijakan bansos serta menjadi masukan bagi pemerintah agar pendistribusian bansos dapat berjalan lebih adil, transparan, dan tepat sasaran (Gusrienti, 2025b).

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah adanya potensi ketidakadilan dan diskriminasi dalam penetapan prioritas penerima bansos bagi kelompok rentan di Kelurahan Kenangan Baru, yang dapat menimbulkan kecemburuan sosial serta konflik antar warga, sehingga diperlukan kajian mengenai penerapan nilai sila ke-3 Persatuan Indonesia dalam menciptakan harmoni sosial. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu berfokus pada penerapan nilai sila ke-3 Persatuan Indonesia dalam penetapan prioritas penerima bansos bagi kelompok rentan di Kelurahan Kenangan Baru, khususnya terkait prinsip non-diskriminatif, potensi konflik sosial, dan terciptanya harmoni antar warga. Beberapa Rumusan Masalah dalam Penelitian ini yaitu: Bagaimana pemerintah daerah menjaga prinsip non-diskriminatif dalam menetapkan prioritas penerima bansos bagi kelompok rentan di Kelurahan Kenangan Baru? Apakah distribusi bansos di Kelurahan Kenangan Baru mampu mencegah munculnya konflik sosial atau kecemburuan antar warga? Bagaimana peran nilai sila ke-3 Pancasila (Persatuan Indonesia) dalam menciptakan harmoni sosial melalui penetapan penerima bansos di Kelurahan Kenangan Baru? Adapun Tujuan dari Penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui bagaimana pemerintah daerah menerapkan prinsip non-diskriminatif dalam penetapan prioritas penerima bansos bagi kelompok rentan di Kelurahan Kenangan Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Untuk menganalisis peran nilai sila ke-3 Pancasila (Persatuan Indonesia) dalam menciptakan harmoni sosial serta mencegah konflik antar warga melalui distribusi bansos di Kelurahan Kenangan Baru.

Kerangka Berfikir



Gambar 1. Peta Konsep

Jurnal Yang Relevan

1. Penelitian yang relevan yang ditulis oleh F. F. Br. Sembiring & R. Nababan "Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Dtks) Terhadap Bantuan Sosial Bagi Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Simpang Selayang". Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa DTKS menjadi instrumen penting dalam penyaluran bantuan sosial karena digunakan sebagai dasar utama pemerintah untuk menentukan masyarakat yang tergolong miskin dan rentan. Penulis menjelaskan bahwa keberhasilan program bansos sangat dipengaruhi oleh keakuratan DTKS, sebab data tersebut menentukan siapa yang diprioritaskan sebagai penerima bantuan. Namun, penulis juga menyoroti permasalahan yang sering terjadi yaitu data yang tidak

diperbarui secara berkala sehingga tidak sesuai dengan kondisi masyarakat yang berubah. Akibatnya, terjadi kesalahan dalam penetapan penerima bansos seperti warga miskin yang seharusnya menerima bantuan justru tidak terdata, sedangkan warga yang sudah mampu masih menerima bantuan. Jurnal ini juga menjelaskan bahwa ketidaktepatan data dapat menimbulkan masalah sosial di masyarakat, seperti munculnya kecemburuan sosial antar warga. Warga yang merasa layak tetapi tidak menerima bansos akan menganggap pemerintah tidak adil dan tidak menjalankan prinsip non-diskriminatif. Selain itu, kesalahan data juga dapat memunculkan konflik horizontal karena adanya tuduhan pilih kasih atau nepotisme dalam pendataan. Dengan demikian, DTKS tidak hanya berfungsi sebagai data administratif, tetapi juga sebagai faktor penentu stabilitas sosial di masyarakat. Kesimpulan dari jurnal ini menyatakan bahwa pemerintah perlu melakukan pembaruan DTKS secara rutin melalui proses verifikasi dan validasi lapangan. Keterlibatan aparat kelurahan serta masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa data penerima bansos benar-benar sesuai kondisi riil. Jika DTKS dikelola dengan baik, maka bansos dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi kelompok rentan sekaligus memperkuat solidaritas sosial masyarakat (Sembiring & Nababan, 2024).

2. Penelitian yang relevan yang ditulis oleh (Aritonang & Trimurni, 2024) "Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penyediaan Data Peserta Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Kampung Seraya Kota Batam". Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa akuntabilitas pemerintah sangat memengaruhi keberhasilan program bantuan sosial, khususnya dalam penyediaan data penerima bantuan. Penulis menjelaskan bahwa dinas sosial sebagai pelaksana kebijakan harus mampu memastikan bahwa pendataan penerima bansos dilakukan secara objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam proses tersebut, pemerintah harus melakukan validasi data agar penerima bantuan benar-benar masyarakat yang membutuhkan. Apabila proses pendataan tidak akuntabel, maka program bansos dapat menimbulkan permasalahan sosial seperti ketidaktepatan sasaran, ketidakadilan, dan meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat. Penulis juga menjelaskan bahwa akuntabilitas sangat berkaitan dengan prinsip non-diskriminatif. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap warga yang memenuhi kriteria kelompok rentan memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh bantuan. Jika pendataan tidak akurat atau terjadi manipulasi data, maka masyarakat dapat menilai bahwa pemerintah melakukan diskriminasi atau memberikan bantuan berdasarkan kedekatan tertentu. Hal ini dapat memunculkan konflik sosial di masyarakat karena adanya kecemburuan sosial dan ketegangan antar warga. Kesimpulan dari jurnal ini menegaskan bahwa pemerintah perlu memperkuat sistem akuntabilitas melalui peningkatan pengawasan internal, pelaporan terbuka, serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan bansos. Dengan akuntabilitas yang kuat, program bansos dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat stabilitas sosial dan harmoni di lingkungan masyarakat (Aritonang & Trimurni, 2024).
3. Penelitian yang relevan yang ditulis oleh (Gemiharto & Juningsih, 2021) "Komunikasi Pemerintahan Dalam Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Tunai Di Kabupaten Bandung". Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa komunikasi pemerintahan merupakan faktor utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan bansos. Penulis menjelaskan bahwa kebijakan bantuan sosial tunai tidak akan berjalan efektif jika pemerintah tidak mampu menyampaikan informasi secara jelas kepada masyarakat. Informasi tersebut meliputi prosedur penetapan penerima, syarat penerimaan, mekanisme penyaluran, serta jalur pengaduan apabila terjadi kesalahan data. Kurangnya komunikasi dan sosialisasi akan membuat masyarakat mudah salah paham dan menilai bahwa program bansos dijalankan

secara tidak adil. Penulis juga menjelaskan bahwa komunikasi pemerintah yang baik dapat meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan bansos. Ketika warga mengetahui alasan mengapa seseorang menerima atau tidak menerima bantuan, maka potensi konflik sosial dapat ditekan. Sebaliknya, jika informasi tidak terbuka, masyarakat akan mudah terprovokasi isu negatif seperti pilih kasih, nepotisme, atau diskriminasi dalam pembagian bansos. Hal tersebut dapat menimbulkan kecemburuan sosial, ketegangan antar warga, bahkan konflik horizontal. Kesimpulan dari jurnal ini menyatakan bahwa pemerintah harus meningkatkan efektivitas komunikasi publik melalui sosialisasi langsung, pemanfaatan media sosial, serta keterbukaan informasi penerima bantuan. Dengan komunikasi yang transparan, kebijakan bansos dapat berjalan sesuai prinsip keadilan sosial serta membantu menjaga persatuan dan keharmonisan masyarakat (Gemiharto & Juningsih, 2021).

4. Penelitian yang relevan yang ditulis oleh (Indawati, 2022) "Efektivitas Penyaluran Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Kalabbirang, Kabupaten Takalar". Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa bantuan sosial tunai memiliki peran penting dalam membantu masyarakat miskin menghadapi tekanan ekonomi, terutama pada masa pandemi COVID-19. Penulis menjelaskan bahwa efektivitas penyaluran bansos dapat dilihat dari beberapa indikator seperti ketepatan sasaran penerima, ketepatan waktu distribusi, serta dampak bantuan terhadap kesejahteraan masyarakat. Bantuan sosial tunai sangat membantu warga dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan dan kebutuhan rumah tangga. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih ditemukan masalah pendataan yang kurang akurat sehingga menyebabkan sebagian masyarakat miskin tidak mendapatkan bantuan. Penulis juga menjelaskan bahwa ketidaktepatan sasaran dapat menimbulkan masalah sosial di masyarakat. Warga yang merasa lebih membutuhkan namun tidak menerima bantuan akan mengalami kekecewaan dan memunculkan persepsi bahwa pemerintah tidak adil. Situasi ini dapat memunculkan kecemburuan sosial, bahkan memicu konflik antar warga. Selain itu, penulis menyoroti bahwa proses distribusi yang tidak merata dapat mengganggu keharmonisan sosial karena warga merasa pemerintah tidak menjalankan prinsip persatuan dan keadilan sosial. Kesimpulan dari jurnal ini adalah bahwa pemerintah perlu memperbaiki sistem pendataan, memperkuat pengawasan, serta melakukan evaluasi secara berkala agar bansos benar-benar diterima oleh masyarakat yang layak. Jika program bansos berjalan efektif, maka bantuan tersebut dapat menjaga stabilitas sosial serta memperkuat solidaritas masyarakat (Indawati, 2022).
5. Penelitian yang relevan yang ditulis oleh (Fardi & Pratama, 2023) "Transparansi Pendataan Program Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Lingkungan Bebidas Kelurahan Pegesangan Kota Mataram". Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa transparansi merupakan aspek penting dalam pendataan bansos karena berkaitan langsung dengan keadilan dan kepercayaan masyarakat. Penulis menjelaskan bahwa transparansi diperlukan agar masyarakat mengetahui bagaimana proses pendataan dilakukan, siapa saja yang berhak menerima bansos, serta apa saja kriteria yang digunakan pemerintah. Jika proses pendataan tidak transparan, maka masyarakat akan menilai bahwa pemerintah memberikan bantuan secara tidak objektif. Hal tersebut akan memperbesar peluang munculnya persepsi diskriminatif atau ketidakadilan dalam pembagian bansos. Penulis juga menekankan bahwa transparansi pendataan dapat mencegah terjadinya konflik sosial. Ketika masyarakat tidak memperoleh informasi jelas, mereka akan mudah terprovokasi oleh isu negatif seperti pilih kasih, nepotisme, atau manipulasi data penerima bantuan. Hal ini dapat menimbulkan ketegangan sosial antar warga, karena warga yang tidak menerima bansos dapat menuduh penerima sebagai pihak yang tidak layak. Transparansi juga berkaitan dengan implementasi

nilai sila ke-3 Pancasila, karena jika pemerintah transparan dan adil maka masyarakat akan merasa diperlakukan setara sehingga solidaritas sosial dan persatuan dapat terjaga. Kesimpulan dari jurnal ini adalah bahwa pemerintah perlu memperkuat transparansi dengan cara membuka informasi penerima bansos, melibatkan masyarakat dalam pendataan, serta menyediakan mekanisme pengaduan publik. Dengan demikian, bansos dapat menjadi alat untuk mengurangi kemiskinan sekaligus menjaga keharmonisan sosial dan persatuan masyarakat.

Berdasarkan lima jurnal relevan yang telah dianalisis, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan program bantuan sosial sangat dipengaruhi oleh keakuratan data penerima, terutama melalui DTKS sebagai dasar utama penetapan kelompok rentan. Selain itu, akuntabilitas pemerintah dalam proses pendataan dan penyaluran bansos menjadi faktor penting untuk menjaga keadilan dan mencegah terjadinya penyimpangan. Jurnal-jurnal tersebut juga menunjukkan bahwa transparansi informasi dan komunikasi pemerintah kepada masyarakat berperan besar dalam membangun kepercayaan publik serta mencegah munculnya kecemburuan sosial. Selanjutnya, efektivitas bansos tidak hanya diukur dari manfaat ekonomi yang diterima masyarakat, tetapi juga dari dampaknya terhadap stabilitas sosial dan potensi konflik horizontal antar warga. Dengan demikian, secara keseluruhan penelitian terdahulu menegaskan bahwa bansos yang tepat sasaran, transparan, dan akuntabel mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat harmoni sosial di lingkungan masyarakat (Aritonang & Trimurni, 2024; Fardi & Pratama, 2023; Gemiharto & Juningsih, 2021; Indawati, 2022; Rahayu, 2012).

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini dapat dilihat dari fokus kajian, objek penelitian, dan pendekatan nilai yang digunakan. Penelitian terdahulu pada umumnya lebih menekankan aspek teknis dan administratif bansos, seperti ketepatan data DTKS, efektivitas penyaluran bantuan, transparansi pendataan, serta akuntabilitas kinerja pemerintah dalam pelaksanaan program bantuan sosial. Sebagian besar penelitian sebelumnya menilai program bansos dari sudut pandang tata kelola pemerintahan dan efektivitas kebijakan, terutama terkait kesalahan pendataan, mekanisme distribusi, serta hambatan dalam implementasi bantuan sosial. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan sekarang memiliki kebaruan karena tidak hanya mengkaji aspek administratif bansos, tetapi lebih menitikberatkan pada implementasi nilai Persatuan Indonesia (Sila ke-3 Pancasila) dalam proses penetapan prioritas penerima bansos bagi kelompok rentan. Penelitian ini secara khusus akan mengkaji bagaimana pemerintah daerah menjaga prinsip non-diskriminatif dalam menentukan penerima bansos, serta menilai apakah distribusi bansos mampu mencegah konflik sosial antar warga. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis bagaimana nilai persatuan dapat menciptakan harmoni sosial dalam masyarakat Kelurahan Kenangan Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Dengan demikian, penelitian ini lebih menonjolkan aspek ideologis dan sosial-politik Pancasila dalam kebijakan bansos, sehingga menjadi pembeda utama dibandingkan penelitian terdahulu yang cenderung berfokus pada aspek evaluasi teknis pelaksanaan program bansos.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya memahami secara mendalam fenomena sosial yang terjadi di masyarakat, khususnya terkait bagaimana pemerintah daerah menerapkan prinsip persatuan dalam proses penetapan prioritas penerima bantuan sosial (bansos). Pendekatan ini juga relevan karena objek kajian penelitian bukan berupa angka atau statistik semata, melainkan berupa pengalaman, persepsi, dan pandangan masyarakat

mengenai proses penentuan penerima bansos. Dengan demikian, penelitian ini dapat menggambarkan secara rinci praktik non-diskriminasi dalam kebijakan bansos dan bagaimana dampaknya terhadap hubungan sosial masyarakat. Selain itu, penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi nyata yang terjadi di Kelurahan Kenangan Baru, baik dalam mekanisme pendataan DTKS, proses verifikasi penerima, hingga dampak distribusi bansos terhadap stabilitas sosial. Pendekatan deskriptif juga membantu peneliti memaparkan bentuk penerapan nilai sila ke-3 Pancasila (Persatuan Indonesia) dalam menjaga harmoni sosial di masyarakat. Melalui metode ini, peneliti dapat mengungkap apakah bansos menjadi alat untuk memperkuat solidaritas sosial atau justru berpotensi menimbulkan konflik antar warga akibat ketidaktepatan sasaran (Fardi & Pratama, 2023). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. **Observasi.** Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung kondisi sosial masyarakat Kelurahan Kenangan Baru, termasuk hubungan sosial antar warga setelah adanya distribusi bansos. Observasi juga bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat kecemburuan sosial, konflik, atau ketegangan antar warga terkait penerimaan bantuan sosial. Selain itu, observasi dilakukan untuk melihat bagaimana aparat kelurahan melaksanakan pendataan dan proses distribusi bansos di lapangan. Dengan observasi, peneliti dapat memperoleh gambaran nyata mengenai implementasi prinsip persatuan dalam kehidupan sosial masyarakat. Observasi sangat relevan karena penelitian bansos seringkali menunjukkan adanya perbedaan persepsi masyarakat terkait keadilan distribusi bantuan. Ketika masyarakat melihat adanya ketidakadilan dalam distribusi bansos, maka dapat memunculkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Oleh karena itu, observasi menjadi salah satu cara untuk memahami fenomena sosial secara langsung, bukan hanya berdasarkan informasi wawancara (Gemiharto & Juningsih, 2021).
2. **Wawancara.** Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti dapat menggali informasi secara mendalam. Informasi yang ingin diperoleh meliputi bagaimana prosedur penetapan penerima bansos dilakukan, apakah prosesnya transparan, serta apakah terdapat unsur diskriminasi atau ketidakadilan dalam pendataan. Wawancara dilakukan dengan aparat kelurahan, petugas pendamping sosial, serta masyarakat penerima dan non-penerima bansos. Teknik ini penting karena persepsi masyarakat menjadi salah satu indikator utama dalam menilai apakah bansos sudah sesuai dengan nilai persatuan dan keadilan sosial. Selain itu, wawancara juga dapat menggali bagaimana pemerintah kelurahan melakukan komunikasi kepada masyarakat terkait mekanisme bansos. Jika komunikasi tidak berjalan baik, masyarakat dapat salah paham dan menilai pemerintah tidak adil. Oleh karena itu, wawancara membantu peneliti mengetahui apakah pemerintah sudah melakukan sosialisasi secara terbuka sehingga dapat mengurangi konflik sosial (Aritonang & Trimurni, 2024; Gemiharto & Juningsih, 2021).
3. **Dokumentasi.** Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data tertulis maupun visual yang berkaitan dengan bansos. Dokumen yang dikumpulkan seperti daftar penerima bansos, data DTKS, berita acara musyawarah kelurahan, laporan kegiatan distribusi bansos, foto kegiatan, serta dokumen peraturan tentang bansos. Dokumentasi sangat penting karena dapat digunakan sebagai bukti pendukung yang memperkuat data hasil observasi dan wawancara. Dokumentasi juga bermanfaat untuk melihat kesesuaian prosedur pendataan bansos dengan aturan yang berlaku. Dengan dokumen resmi, peneliti dapat menilai apakah bansos disalurkan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas atau justru terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya. Hal ini penting karena transparansi pendataan menjadi faktor utama dalam mencegah konflik sosial akibat kecemburuan warga (Fardi & Pratama, 2023).



Gambar 2.

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Kenangan Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Lokasi tersebut dipilih karena merupakan wilayah yang menjalankan program bantuan sosial bagi masyarakat, sehingga relevan untuk mengkaji ketepatan sasaran bansos serta penerapan nilai persatuan dalam menjaga keharmonisan sosial masyarakat. Subjek penelitian dalam penelitian ini meliputi lurah, perangkat kelurahan (Kasi Kesra atau staf bansos), pendamping sosial/petugas DTKS, kepala lingkungan/kepling, masyarakat penerima bansos, serta masyarakat yang tidak menerima bansos namun merasa layak. Subjek tersebut dipilih agar peneliti memperoleh data yang seimbang mengenai proses penetapan penerima bansos, penerapan prinsip non-diskriminatif, serta dampak bansos terhadap potensi konflik sosial dan persatuan masyarakat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip Non-Diskriminatif dalam Penetapan Penerima Bansos

Reduksi Data

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Kelurahan Kenangan Baru, diperoleh berbagai informasi mengenai proses penentuan penerima bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Aparat kelurahan menjelaskan bahwa penentuan penerima bantuan sosial pada dasarnya mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh pemerintah pusat. Data tersebut digunakan sebagai acuan utama dalam menentukan masyarakat yang dianggap memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan sosial. Selain itu, aparat kelurahan juga melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan kondisi ekonomi masyarakat yang tercatat dalam data tersebut. Verifikasi ini dilakukan melalui koordinasi dengan kepala lingkungan serta tokoh masyarakat setempat. Dengan demikian, proses penentuan penerima bantuan sosial tidak hanya bergantung pada data administrasi tetapi juga mempertimbangkan kondisi nyata masyarakat di lapangan. Dalam proses pendataan tersebut, aparat kelurahan berusaha menerapkan prinsip non-diskriminatif dalam menentukan masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh bantuan selama memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, dalam proses pendataan tidak dilakukan pembedaan berdasarkan latar belakang suku, agama, ataupun hubungan personal dengan aparat pemerintah. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan secara adil kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Aparat kelurahan juga berupaya menghindari praktik nepotisme yang dapat merugikan masyarakat lain yang lebih membutuhkan bantuan. Dengan adanya penerapan prinsip tersebut diharapkan distribusi bantuan sosial dapat berjalan secara lebih objektif dan transparan.

Meskipun demikian, hasil wawancara dengan beberapa masyarakat menunjukkan bahwa masih terdapat persepsi yang berbeda mengenai keadilan dalam distribusi bantuan sosial. Beberapa warga menyampaikan bahwa masih ada masyarakat yang secara ekonomi dianggap mampu tetapi tetap menerima bantuan sosial. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai akurasi data yang digunakan dalam penentuan penerima bantuan. Selain itu, beberapa warga juga mengungkapkan bahwa mereka kurang memahami secara jelas bagaimana mekanisme penentuan penerima bantuan tersebut dilakukan. Kurangnya informasi mengenai proses pendataan dapat memicu munculnya berbagai spekulasi di masyarakat. Oleh karena itu, transparansi dalam proses penentuan penerima bantuan menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain faktor transparansi, pembaruan data juga menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga keakuratan informasi mengenai kondisi ekonomi masyarakat. Data penerima bantuan sosial perlu diperbarui secara berkala agar sesuai dengan kondisi terbaru masyarakat. Hal ini penting karena kondisi ekonomi seseorang dapat berubah seiring waktu, baik menjadi lebih baik maupun lebih buruk. Apabila data tidak diperbarui secara berkala, maka kemungkinan terjadinya kesalahan dalam penentuan penerima bantuan akan semakin besar. Oleh karena itu, pemerintah kelurahan perlu bekerja sama dengan masyarakat dalam memperbarui data secara rutin. Keterlibatan masyarakat dalam proses pendataan juga dapat meningkatkan rasa kepercayaan terhadap kebijakan pemerintah.

Dalam penelitian ini, proses reduksi data dilakukan dengan menyeleksi berbagai informasi yang berkaitan langsung dengan penerapan prinsip non-diskriminatif dalam penentuan penerima bantuan sosial. Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi kemudian dianalisis untuk menemukan pola yang relevan dengan fokus penelitian. Peneliti juga membandingkan berbagai pandangan dari informan yang berbeda untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai fenomena yang terjadi di masyarakat. Proses analisis ini dilakukan dengan mengaitkan temuan lapangan dengan teori mengenai kebijakan sosial dan keadilan dalam distribusi bantuan pemerintah. Dengan demikian, hasil penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi prinsip non-diskriminatif dalam kebijakan bantuan sosial (Gemiharto & Juningsih, 2021).

Display Data

Tabel 1.

Indikator Penelitian	Pertanyaan Wawancara	Respon Informan	Interpretasi Data
Pemahaman masyarakat terhadap bantuan sosial	Bagaimana pemahaman masyarakat mengenai program bantuan sosial yang diberikan pemerintah?	Wawan Sunandar menyatakan bahwa bantuan sosial merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi agar dapat memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.	Bantuan sosial dipahami masyarakat sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang membutuhkan.
Tujuan pemberian bantuan sosial	Menurut Bapak, apa tujuan utama dari bantuan sosial yang diberikan pemerintah?	Informan menjelaskan bahwa bantuan sosial diberikan untuk meringankan beban masyarakat yang kurang mampu terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup.	Bantuan sosial dipandang sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Manfaat bantuan sosial bagi masyarakat	Apakah bantuan sosial memberikan manfaat bagi masyarakat yang menerima?	Informan menyampaikan bahwa bantuan sosial sangat membantu masyarakat terutama bagi keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi.	Bantuan sosial memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat yang membutuhkan.
Dampak sosial dari bantuan sosial	Bagaimana dampak bantuan sosial terhadap kehidupan masyarakat di lingkungan sekitar?	Informan menyatakan bahwa bantuan sosial dapat membantu masyarakat bertahan dalam kondisi ekonomi yang sulit.	Program bantuan sosial memiliki peran dalam membantu stabilitas ekonomi masyarakat.

Verifikasi Data

Verifikasi data dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh dalam penelitian benar-benar dapat dipercaya. Proses verifikasi ini dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dari berbagai informan yang berbeda. Peneliti juga melakukan pengecekan ulang terhadap data yang diperoleh melalui observasi lapangan. Dengan cara ini, peneliti dapat memastikan bahwa informasi yang digunakan dalam penelitian memiliki tingkat validitas yang tinggi. Selain itu, proses verifikasi juga membantu peneliti dalam menghindari kesalahan interpretasi terhadap data yang diperoleh. Oleh karena itu, verifikasi data menjadi salah satu tahap penting dalam penelitian kualitatif. Proses verifikasi juga dilakukan melalui teknik triangulasi sumber. Teknik ini dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari aparat kelurahan dengan informasi yang diberikan oleh masyarakat. Apabila kedua sumber informasi tersebut menunjukkan hasil yang relatif sama, maka data tersebut dapat dianggap valid. Namun apabila terdapat perbedaan yang signifikan, maka peneliti perlu melakukan pengecekan lebih lanjut. Dengan demikian, triangulasi sumber membantu meningkatkan keakuratan hasil penelitian. Metode ini sering digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memastikan keabsahan data.

Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pemerintah kelurahan telah berupaya menjalankan proses pendataan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Aparat kelurahan menggunakan data resmi dari pemerintah sebagai dasar dalam menentukan penerima bantuan sosial. Namun demikian, terdapat beberapa kendala dalam proses pelaksanaannya. Salah satu kendala yang sering terjadi adalah keterlambatan pembaruan data masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara kondisi ekonomi masyarakat dengan data yang tercatat dalam sistem. Selain itu, verifikasi data juga menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat mengenai kebijakan bantuan sosial masih bervariasi. Sebagian masyarakat memahami bahwa bantuan sosial diberikan berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun ada juga masyarakat yang belum memahami secara jelas bagaimana mekanisme tersebut bekerja. Kurangnya pemahaman ini dapat memicu munculnya persepsi negatif terhadap kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi mengenai program bantuan sosial kepada masyarakat. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip non-diskriminatif dalam distribusi bantuan sosial telah diupayakan oleh pemerintah kelurahan. Namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki agar kebijakan tersebut dapat berjalan secara lebih efektif. Perbaikan tersebut antara lain berkaitan dengan peningkatan transparansi informasi serta pembaruan data masyarakat secara berkala. Dengan adanya perbaikan tersebut diharapkan distribusi bantuan sosial dapat berjalan secara lebih adil dan tepat sasaran.

Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana prinsip non-diskriminatif diterapkan dalam kebijakan distribusi bantuan sosial di tingkat masyarakat. Prinsip ini merupakan salah satu nilai penting dalam kebijakan sosial yang bertujuan untuk menjamin keadilan bagi seluruh masyarakat. Dalam konteks bantuan sosial, prinsip non-diskriminatif menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk memperoleh bantuan selama memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, penerapan prinsip ini menjadi sangat penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Apabila bantuan sosial diberikan secara tidak adil, maka dapat menimbulkan berbagai konflik sosial di masyarakat. Dengan demikian, implementasi prinsip non-diskriminatif menjadi salah satu indikator keberhasilan kebijakan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat kelurahan telah berupaya menerapkan prinsip tersebut melalui penggunaan data resmi pemerintah serta proses verifikasi lapangan. Pendataan yang dilakukan

melalui DTKS menjadi dasar utama dalam menentukan penerima bantuan sosial. Namun demikian, proses pendataan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Salah satu tantangan yang paling sering muncul adalah ketidaksesuaian antara data yang tercatat dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pendataan perlu terus diperbaiki agar lebih akurat. Dengan data yang akurat, kebijakan bantuan sosial dapat dilaksanakan secara lebih efektif.

Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa transparansi informasi merupakan faktor yang sangat penting dalam implementasi kebijakan bantuan sosial. Masyarakat perlu memahami bagaimana proses penentuan penerima bantuan dilakukan agar tidak muncul persepsi negatif terhadap pemerintah. Apabila masyarakat tidak mendapatkan informasi yang cukup, maka mereka cenderung menilai kebijakan tersebut sebagai sesuatu yang tidak adil. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan komunikasi dengan masyarakat melalui berbagai forum seperti musyawarah lingkungan. Dengan adanya komunikasi yang baik, masyarakat akan lebih mudah memahami kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa distribusi bantuan sosial yang tidak tepat sasaran dapat menimbulkan berbagai masalah sosial di masyarakat. Masalah tersebut antara lain berupa kecemburuan sosial, konflik antar warga, serta menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa bantuan sosial diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Proses pendataan yang akurat dan transparan menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian, kebijakan bantuan sosial dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip non-diskriminatif dalam distribusi bantuan sosial telah dilakukan oleh pemerintah kelurahan, meskipun masih terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaannya. Tantangan tersebut terutama berkaitan dengan akurasi data dan transparansi informasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan yang berkelanjutan agar kebijakan bantuan sosial dapat dilaksanakan secara lebih adil dan tepat sasaran. Dengan adanya perbaikan tersebut, diharapkan bantuan sosial dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat yang membutuhkan (Gemiharto & Juningsih, 2021).

Dampak Distribusi Bansos terhadap Hubungan Sosial Masyarakat Reduksi Data

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan masyarakat di Kelurahan Kenangan Baru, diperoleh berbagai informasi mengenai dampak distribusi bantuan sosial terhadap kehidupan masyarakat. Sebagian besar informan menyatakan bahwa bantuan sosial memberikan dampak positif bagi kondisi ekonomi keluarga mereka. Bantuan tersebut biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, kebutuhan rumah tangga, dan keperluan pendidikan anak. Dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil, bantuan sosial menjadi salah satu bentuk dukungan yang sangat membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan pendapatan. Dengan adanya bantuan tersebut, masyarakat merasa sedikit terbantu dalam mengurangi beban pengeluaran rumah tangga. Oleh karena itu, program bantuan sosial dianggap sebagai salah satu kebijakan pemerintah yang cukup penting bagi masyarakat yang membutuhkan. Selain memberikan dampak ekonomi, distribusi bantuan sosial juga memiliki pengaruh terhadap hubungan sosial masyarakat. Dalam beberapa kasus, perbedaan dalam penerimaan bantuan sosial dapat menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat. Sebagian masyarakat merasa bahwa pembagian bantuan sudah dilakukan dengan cukup adil oleh pemerintah. Namun ada juga masyarakat yang merasa bahwa bantuan tersebut belum sepenuhnya tepat sasaran. Perbedaan persepsi ini muncul karena masyarakat memiliki pandangan yang berbeda mengenai siapa yang dianggap paling membutuhkan bantuan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa distribusi bantuan sosial tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi tetapi juga pada dinamika sosial masyarakat.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa dalam beberapa situasi muncul rasa kecemburuan sosial di kalangan masyarakat yang tidak menerima bantuan. Kecemburuan tersebut biasanya muncul ketika masyarakat menilai bahwa ada individu yang secara ekonomi lebih mampu tetapi tetap menerima bantuan sosial. Meskipun demikian, sebagian besar informan menyatakan bahwa kecemburuan tersebut tidak sampai menimbulkan konflik yang serius di masyarakat. Hubungan sosial antar warga pada umumnya tetap terjaga dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki kesadaran untuk menjaga hubungan sosial yang harmonis. Dengan demikian, meskipun terdapat perbedaan dalam penerimaan bantuan sosial, masyarakat tetap berusaha menjaga kerukunan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa komunikasi antar warga memiliki peran penting dalam menjaga hubungan sosial masyarakat. Ketika muncul perbedaan pendapat mengenai distribusi bantuan sosial, masyarakat biasanya membicarakan masalah tersebut dalam forum informal seperti pertemuan lingkungan atau percakapan antar tetangga. Melalui komunikasi tersebut, masyarakat dapat saling memahami kondisi masing-masing sehingga konflik dapat dihindari. Proses komunikasi ini juga menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan secara bersama-sama. Oleh karena itu, hubungan sosial masyarakat tetap dapat terjaga meskipun terdapat perbedaan dalam penerimaan bantuan sosial. Dalam penelitian ini, proses reduksi data dilakukan dengan menyeleksi berbagai informasi yang berkaitan dengan dampak distribusi bantuan sosial terhadap hubungan sosial masyarakat. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi kemudian dianalisis untuk menemukan pola-pola yang relevan dengan fokus penelitian. Peneliti juga mengelompokkan berbagai pandangan informan untuk memahami bagaimana masyarakat merespons kebijakan bantuan sosial. Dengan demikian, proses analisis data dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dampak sosial dari kebijakan bantuan pemerintah. Hasil analisis ini kemudian dikaitkan dengan teori mengenai kebijakan sosial dan solidaritas masyarakat (Wibowo & Machdum, 2023b).

Display Data

Tabel 2.

Indikator Penelitian	Pertanyaan Wawancara	Respon Informan	Interpretasi Data
Persepsi masyarakat terhadap keadilan penyaluran bantuan	Bagaimana pandangan masyarakat mengenai pembagian bantuan sosial di lingkungan ini?	Diki Prasetyo menyampaikan bahwa pembagian bantuan sosial pada dasarnya diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, namun masih ada sebagian warga yang merasa belum mendapatkannya.	Terdapat perbedaan persepsi masyarakat mengenai keadilan dalam pembagian bantuan sosial.
Kriteria penerima bantuan sosial	Menurut Bapak, apakah penerima bantuan sosial sudah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan?	Informan menyatakan bahwa sebagian besar penerima bantuan memang masyarakat yang kurang mampu, tetapi terkadang masih ada perbedaan pendapat di masyarakat.	Penyaluran bantuan sosial pada dasarnya sudah mengacu pada kriteria tertentu meskipun masih terdapat persepsi yang berbeda di masyarakat.
Tanggapan masyarakat terhadap pembagian bantuan	Bagaimana tanggapan masyarakat yang tidak menerima bantuan sosial?	Informan menjelaskan bahwa sebagian masyarakat dapat memahami kondisi tersebut, namun ada juga yang merasa kecewa karena tidak menerima bantuan.	Respon masyarakat terhadap pembagian bantuan sosial cukup beragam.
Potensi konflik sosial	Apakah perbedaan penerimaan bantuan sosial pernah	Informan menyatakan bahwa terkadang muncul pembicaraan di masyarakat, tetapi	Perbedaan penerimaan bantuan sosial dapat menimbulkan perbedaan

	menimbulkan konflik di masyarakat?	biasanya tidak sampai menimbulkan konflik besar.	pendapat tetapi masih dapat dikendalikan.
--	------------------------------------	--	---

Verifikasi Data

Verifikasi data dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi memiliki tingkat keakuratan yang tinggi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber untuk memeriksa keabsahan data. Teknik ini dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan yang berbeda. Apabila informasi yang diberikan oleh beberapa informan menunjukkan kesamaan, maka data tersebut dapat dianggap memiliki tingkat validitas yang tinggi. Selain itu, peneliti juga melakukan pengecekan ulang terhadap catatan hasil wawancara. Dengan cara ini, kesalahan dalam interpretasi data dapat diminimalkan. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat merasakan manfaat dari program bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah. Bantuan tersebut membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Selain itu, bantuan sosial juga memberikan rasa aman bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi. Dengan adanya bantuan tersebut, masyarakat merasa bahwa pemerintah hadir untuk membantu mereka dalam menghadapi kesulitan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan bantuan sosial memiliki dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, hasil verifikasi juga menunjukkan bahwa distribusi bantuan sosial masih menghadapi beberapa tantangan di tingkat masyarakat. Salah satu tantangan tersebut adalah munculnya kecemburuan sosial di kalangan masyarakat yang tidak menerima bantuan. Meskipun kecemburuan tersebut tidak sampai menimbulkan konflik serius, namun tetap menjadi perhatian dalam pelaksanaan kebijakan bantuan sosial. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa bantuan sosial diberikan secara tepat sasaran.

Selain itu, verifikasi data juga menunjukkan bahwa komunikasi antara pemerintah dan masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan program bantuan sosial. Apabila masyarakat memahami bagaimana proses penentuan penerima bantuan dilakukan, maka mereka cenderung lebih mudah menerima kebijakan tersebut. Sebaliknya, kurangnya informasi dapat menimbulkan berbagai persepsi negatif di masyarakat. Oleh karena itu, transparansi informasi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut dapat disimpulkan bahwa bantuan sosial memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Bantuan tersebut tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga mempengaruhi hubungan sosial masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan bantuan sosial perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan konflik sosial di masyarakat.

Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini menyoroti dampak distribusi bantuan sosial terhadap hubungan sosial masyarakat. Program bantuan sosial pada dasarnya bertujuan untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi. Namun dalam praktiknya, kebijakan tersebut juga dapat mempengaruhi dinamika sosial di masyarakat. Perbedaan dalam penerimaan bantuan dapat memunculkan berbagai persepsi di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa bantuan sosial diberikan secara adil dan transparan. Dengan demikian, kebijakan tersebut dapat diterima oleh masyarakat secara lebih luas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan sosial memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat penerima bantuan. Bantuan tersebut membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Dalam situasi ekonomi yang sulit, bantuan sosial dapat menjadi sumber dukungan yang sangat penting bagi keluarga yang memiliki keterbatasan pendapatan. Oleh karena itu, kebijakan bantuan sosial merupakan salah

satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam melindungi masyarakat yang rentan secara ekonomi. Namun demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa distribusi bantuan sosial dapat menimbulkan kecemburuan sosial apabila tidak dilakukan secara tepat sasaran. Kecemburuan tersebut biasanya muncul ketika masyarakat menilai bahwa bantuan tidak diberikan kepada orang yang paling membutuhkan. Oleh karena itu, akurasi data penerima bantuan menjadi faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan bantuan sosial. Dengan data yang akurat, bantuan dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa nilai kebersamaan dan solidaritas sosial masih cukup kuat di masyarakat. Meskipun terdapat perbedaan dalam penerimaan bantuan sosial, masyarakat tetap berusaha menjaga hubungan sosial yang harmonis. Hal ini terlihat dari cara masyarakat menyelesaikan perbedaan pendapat melalui musyawarah. Dengan adanya musyawarah, masyarakat dapat menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa distribusi bantuan sosial memiliki dampak yang kompleks terhadap kehidupan masyarakat. Di satu sisi, bantuan sosial dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan. Namun di sisi lain, kebijakan tersebut juga dapat mempengaruhi hubungan sosial masyarakat apabila tidak dilaksanakan secara tepat sasaran. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus meningkatkan kualitas pelaksanaan program bantuan sosial agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat (Wibowo & Machdum, 2023b).

Peran Nilai Persatuan Indonesia dalam Menciptakan Harmoni Sosial Reduksi Data

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan masyarakat di Kelurahan Kenangan Baru, diketahui bahwa nilai Persatuan Indonesia masih memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan kehidupan sosial masyarakat. Nilai persatuan tersebut tercermin dalam sikap saling menghargai antar warga meskipun terdapat perbedaan kondisi ekonomi maupun perbedaan dalam penerimaan bantuan sosial. Sebagian besar masyarakat memahami bahwa bantuan sosial merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Kesadaran tersebut membuat masyarakat berusaha menerima kebijakan pemerintah dengan sikap yang lebih bijaksana. Meskipun tidak semua warga menerima bantuan, masyarakat tetap berusaha menjaga hubungan baik dengan tetangga dan lingkungan sekitar. Dengan demikian, nilai persatuan menjadi salah satu faktor yang membantu menjaga stabilitas hubungan sosial di masyarakat. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran yang cukup baik mengenai pentingnya menjaga kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam beberapa kasus, perbedaan dalam penerimaan bantuan sosial memang sempat menimbulkan pembicaraan di kalangan masyarakat. Namun pembicaraan tersebut biasanya tidak berkembang menjadi konflik yang serius. Hal ini terjadi karena masyarakat lebih memilih untuk menyelesaikan perbedaan tersebut melalui komunikasi dan musyawarah. Melalui proses musyawarah tersebut, masyarakat dapat saling memahami kondisi masing-masing sehingga konflik dapat dihindari. Dengan demikian, nilai persatuan tetap menjadi landasan penting dalam kehidupan sosial masyarakat.

Selain itu, tokoh masyarakat dan aparat lingkungan juga memiliki peran penting dalam menjaga persatuan masyarakat. Tokoh masyarakat sering kali menjadi pihak yang memberikan penjelasan kepada warga mengenai kebijakan bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah. Mereka juga berperan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memicu konflik sosial. Dengan adanya peran tokoh masyarakat, berbagai permasalahan yang muncul di masyarakat dapat diselesaikan secara

lebih bijaksana. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan tokoh masyarakat sangat penting dalam menjaga stabilitas sosial di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, kerja sama antara pemerintah dan tokoh masyarakat perlu terus ditingkatkan. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai persatuan juga tercermin dalam berbagai aktivitas sosial masyarakat. Masyarakat masih memiliki tradisi gotong royong yang cukup kuat dalam membantu sesama warga yang membutuhkan. Misalnya ketika ada kegiatan lingkungan, masyarakat biasanya bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut secara bersama-sama. Sikap saling membantu ini menunjukkan bahwa nilai solidaritas sosial masih terjaga dengan baik di masyarakat. Nilai tersebut juga menjadi salah satu faktor yang membantu menjaga keharmonisan hubungan antar warga. Dengan adanya solidaritas sosial yang kuat, masyarakat dapat menghadapi berbagai permasalahan secara bersama-sama. Dalam penelitian ini, proses reduksi data dilakukan dengan memfokuskan analisis pada berbagai informasi yang berkaitan dengan peran nilai Persatuan Indonesia dalam menjaga harmoni sosial masyarakat. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi kemudian dianalisis untuk menemukan pola-pola yang relevan dengan fokus penelitian. Peneliti juga mengelompokkan berbagai pandangan informan untuk memahami bagaimana masyarakat memaknai nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai peran nilai persatuan dalam kehidupan sosial masyarakat. Analisis tersebut juga dikaitkan dengan teori mengenai solidaritas sosial dan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat (Anggraeni & Uzaimah, 2024)

Display Data

Tabel 3.

Indikator Penelitian	Pertanyaan Wawancara	Respon Informan	Interpretasi Data
Hubungan sosial antar masyarakat	Apakah perbedaan penerimaan bantuan sosial mempengaruhi hubungan antar warga?	Matus Lumban Batu menjelaskan bahwa hubungan antar warga tetap baik meskipun tidak semua masyarakat menerima bantuan sosial.	Nilai kebersamaan masih terjaga dalam kehidupan masyarakat.
Sikap masyarakat terhadap perbedaan	Bagaimana sikap masyarakat terhadap warga yang menerima bantuan sosial?	Informan menyampaikan bahwa masyarakat umumnya saling memahami kondisi satu sama lain.	Masyarakat memiliki sikap toleransi terhadap perbedaan kondisi ekonomi.
Penyelesaian perbedaan pendapat	Bagaimana masyarakat menyelesaikan perbedaan pendapat terkait bantuan sosial?	Informan menjelaskan bahwa biasanya masalah dibicarakan secara musyawarah bersama warga atau melalui tokoh masyarakat.	Musyawarah menjadi cara utama masyarakat dalam menyelesaikan masalah sosial.
Peran nilai persatuan dalam masyarakat	Menurut Bapak, apakah nilai persatuan masih terlihat dalam kehidupan masyarakat saat ini?	Informan menyatakan bahwa masyarakat masih menjaga kebersamaan dan saling membantu dalam kehidupan sehari-hari.	Nilai persatuan masih menjadi dasar dalam menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat.

Verifikasi Data

Verifikasi data dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh dalam penelitian memiliki tingkat keakuratan yang tinggi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber untuk memeriksa keabsahan data. Teknik ini dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan yang berbeda. Apabila informasi yang diberikan oleh informan menunjukkan kesamaan, maka data tersebut dapat

dianggap valid. Selain itu, peneliti juga melakukan pengecekan ulang terhadap catatan hasil wawancara. Dengan demikian, kemungkinan kesalahan dalam interpretasi data dapat diminimalkan. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat masih menjunjung tinggi nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun terdapat perbedaan dalam kondisi ekonomi maupun penerimaan bantuan sosial, masyarakat tetap berusaha menjaga hubungan sosial yang harmonis. Hal ini terlihat dari sikap masyarakat yang cenderung menghindari konflik terbuka. Mereka lebih memilih untuk menyelesaikan perbedaan pendapat melalui komunikasi dan musyawarah. Sikap ini menunjukkan bahwa nilai kebersamaan masih cukup kuat dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, verifikasi data juga menunjukkan bahwa peran tokoh masyarakat sangat penting dalam menjaga stabilitas sosial di lingkungan masyarakat. Tokoh masyarakat sering menjadi pihak yang memberikan penjelasan kepada warga mengenai kebijakan pemerintah. Mereka juga berperan dalam menenangkan situasi apabila terjadi perbedaan pendapat di masyarakat. Dengan adanya peran tokoh masyarakat, berbagai potensi konflik dapat dikelola dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan lokal memiliki pengaruh yang cukup besar dalam menjaga harmoni sosial masyarakat.

Verifikasi data juga menunjukkan bahwa nilai gotong royong masih menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat masih sering bekerja sama dalam berbagai kegiatan lingkungan seperti kerja bakti dan kegiatan sosial lainnya. Sikap saling membantu ini mencerminkan adanya solidaritas sosial yang kuat di masyarakat. Dengan adanya solidaritas tersebut, masyarakat dapat menghadapi berbagai permasalahan secara bersama-sama. Nilai gotong royong ini juga menjadi salah satu faktor yang membantu menjaga keharmonisan hubungan sosial masyarakat. Berdasarkan hasil verifikasi data tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai Persatuan Indonesia masih memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Nilai tersebut membantu masyarakat dalam menjaga hubungan sosial yang harmonis meskipun terdapat berbagai perbedaan di antara mereka. Oleh karena itu, nilai persatuan perlu terus dijaga dan diperkuat dalam kehidupan masyarakat.

Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini menyoroti pentingnya nilai Persatuan Indonesia dalam menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat. Nilai persatuan merupakan salah satu nilai dasar dalam Pancasila yang menekankan pentingnya kebersamaan dan solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks masyarakat yang memiliki latar belakang sosial dan ekonomi yang beragam, nilai persatuan menjadi sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial. Tanpa adanya nilai persatuan, perbedaan yang ada di masyarakat dapat dengan mudah menimbulkan konflik sosial. Oleh karena itu, nilai persatuan perlu terus ditanamkan dalam kehidupan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di Kelurahan Kenangan Baru masih memiliki kesadaran yang cukup baik mengenai pentingnya menjaga persatuan. Meskipun terdapat perbedaan dalam penerimaan bantuan sosial, masyarakat tetap berusaha menjaga hubungan sosial yang harmonis. Hal ini menunjukkan bahwa nilai persatuan masih menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat. Sikap saling menghargai dan menghormati antar warga menjadi salah satu faktor yang membantu menjaga stabilitas sosial di masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa musyawarah menjadi salah satu cara yang efektif dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sosial. Melalui musyawarah, masyarakat dapat mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Proses musyawarah ini mencerminkan nilai demokrasi dan kebersamaan dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya musyawarah, konflik sosial dapat diselesaikan secara damai tanpa menimbulkan perpecahan di masyarakat.

Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa nilai solidaritas sosial memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat. Solidaritas sosial dapat memperkuat hubungan antar warga serta meningkatkan rasa kebersamaan dalam menghadapi berbagai permasalahan sosial. Oleh karena itu, nilai solidaritas perlu terus dipelihara dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya solidaritas sosial yang kuat, masyarakat dapat menghadapi berbagai tantangan secara bersama-sama (Anggraeni & Uzaimah, 2024) Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai Persatuan Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga harmoni sosial masyarakat. Nilai tersebut membantu masyarakat dalam menghadapi berbagai perbedaan yang ada di lingkungan mereka. Oleh karena itu, nilai persatuan perlu terus diperkuat melalui berbagai kegiatan sosial dan pendidikan masyarakat. Dengan demikian, kehidupan masyarakat yang harmonis dapat terus terjaga.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program bantuan sosial di masyarakat memiliki keterkaitan dengan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosial. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab tercermin dari tujuan bantuan sosial yang diberikan untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan mereka. Selain itu, nilai keadilan sosial juga terlihat dalam proses penyaluran bantuan yang dilakukan berdasarkan kriteria tertentu agar bantuan dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat perbedaan pandangan masyarakat mengenai pemerataan bantuan tersebut. Di sisi lain, nilai persatuan Indonesia tetap terlihat dalam kehidupan masyarakat karena meskipun tidak semua warga menerima bantuan sosial, hubungan sosial antar masyarakat tetap terjaga dengan baik melalui sikap saling menghargai dan komunikasi yang baik antar warga. Peran tokoh masyarakat dan aparat lingkungan juga sangat penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat serta membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul secara musyawarah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai Pancasila seperti kemanusiaan, keadilan sosial, dan persatuan masih memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat meskipun terdapat berbagai perbedaan dalam kondisi sosial dan ekonomi.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi berbagai pihak dalam meningkatkan pelaksanaan program bantuan sosial di masyarakat. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan transparansi serta kejelasan dalam proses pendataan dan penyaluran bantuan sosial agar masyarakat dapat memahami kriteria penerima bantuan dengan lebih baik dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di lingkungan masyarakat. Selain itu, proses pembaruan data penerima bantuan sosial juga perlu dilakukan secara berkala agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan dapat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat juga diharapkan dapat terus menjaga nilai persatuan, kebersamaan, serta sikap saling menghargai antar sesama warga meskipun terdapat perbedaan dalam penerimaan bantuan sosial. Tokoh masyarakat dan aparat lingkungan juga diharapkan dapat terus berperan aktif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kebijakan bantuan sosial sehingga komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dapat berjalan dengan baik. Dengan adanya kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan tokoh masyarakat, diharapkan pelaksanaan bantuan sosial di masa mendatang dapat berjalan lebih efektif serta mampu menjaga keharmonisan kehidupan sosial masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, P. A., & Uzaimah, L. (2024). Tinjauan Terhadap Kasus Korupsi Bantuan Sosial dan Dampak Bagi Kesejahteraan Masyarakat. *Wahana Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 10(24), 396–404.
- Aritonang, P., & Trimurni, F. (2024). Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penyediaan Data Peserta Program Keluarga Harapan di Kelurahan Kampung Seraya Kota Batam. *JUPIN: Jurnal Penelitian Inovatif*, 4(3), 1399–1410.
- Dwiarto, R. (2023). Inovasi Penyaluran Jaminan Sosial Tepat Sasaran Melalui Kebijakan Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Pemanfaatan Aplikasi “Cek Bansos.” *Prosiding Unimus*.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Fardi, M., & Pratama, I. N. (2023). Transparansi Pendataan Program Bantuan Sosial Tunai dalam Penanggulangan Kemiskinan di Lingkungan Bebidas Kelurahan Pegesangan Kota Mataram. *Journal of Social and Policy Issues*.
- Gemiharto, I., & Juningsih, E. R. (2021). Komunikasi Pemerintahan dalam Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Tunai di Kabupaten Bandung. *Jurnal Manajemen Komunikasi*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.24198/jmk.v6i1.35510>
- Gusrienti, N. (2025a). Konsep Transparansi dan Komunikasi yang Efektif dalam Pencairan Dana Bantuan Sosial Ummat. *Baitul Maal: Journal of Sharia Economics*, 2(2), 180–191.
- Gusrienti, N. (2025b). Konsep Transparansi dan Komunikasi yang Efektif dalam Pencairan Dana Bantuan Sosial Ummat. *BAITUL MAAL: Journal of Sharia Economics*, 2(2), 180–191.
- Herdiana, D. (2018). Sosialisasi kebijakan publik: Pengertian dan konsep dasar. *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik*, 1(3), 13–26.
- Indawati, R. (2022). Efektivitas Penyaluran Program Bantuan Sosial Tunai (BST) di Masa Pandemi COVID-19 di Kelurahan Kalabbirang, Kabupaten Takalar. *Jurnal Administrasi Negara*, 28(1).
- Noerkaisar, N. (2021). Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah untuk Mengatasi Dampak COVID-19 di Indonesia. *MAPAN*, 83.
- Purdianto, A. (2025). *Audit Manajemen Pemerintah: Strategi Mewujudkan Tata Kelola yang Baik*. PT. Penerbit Qriset Indonesia.
- Purwanto, E. A., & Sulistiyastuti, D. R. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik*. Gava Media.
- Rahayu, S. L. (2012). *Bantuan Sosial di Indonesia*. Fokus Media.
- Wibowo, A., & Machdum, S. V. (2023a). *Buku Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Miskin*. <http://www.kilaukata.com>
- Wibowo, A., & Machdum, S. V. (2023b). *Buku Seri 1 Perundang-undangan Sosial: Bantuan Sosial bagi Masyarakat Miskin*.
- Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Media Pressindo.